

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kesehatan tidak hanya sekedar faktor biaya, termasuk didalamnya investasi berharga dalam pembangunan manusia. Dengan kondisi kesehatan yang baik, individu dapat hidup lebih produktif, berkontribusi secara maksimal dalam berbagai bidang, dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, dengan kesehatan yang terjaga, individu dapat menikmati usia yang lebih panjang dan dapat meningkatkan kualitas hidup sehingga individu dapat tetap aktif dan produktif yang pada gilirannya berkontribusi dalam pembangunan ekonomi.

Indikator pembangunan manusia bidang kesehatan di Indonesia yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), belum menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan statistik dunia pada 2021 yang diterbitkan oleh *World Health Organization* (WHO), Indonesia memiliki rata-rata angka harapan hidup yaitu 68 tahun. Sedangkan 31 negara memiliki angka harapan hidup diatas 80 tahun. Di Asia Tenggara, angka harapan hidup Indonesia masih berada di bawah Singapura (83,2 tahun), Malaysia (75 tahun), Vietnam (73,5), Brunei Darussalam (77,5 tahun), Thailand (75,5 tahun). Namun, angka harapan hidup Indonesia masih mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kualitas kesehatan yang menjadi indikator target Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2020-2025 seperti gizi buruk (*stunting*), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB) belum menunjukkan pengurangan signifikan. Peningkatan pada ketiga indikator ini secara langsung berdampak terhadap penurunan atau perlambatan pada kenaikan Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan indikator agregat yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh, dan dipengaruhi oleh tingkat mortalitas pada berbagai kelompok umur, terutama bayi dan ibu. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) adalah dua indikator mortalitas yang memiliki kontribusi besar dalam menghitung rata-rata usia hidup suatu populasi. Ketika AKB tinggi, rata-rata

usia hidup langsung tereduksi karena kematian terjadi pada fase awal kehidupan. Demikian pula, AKI yang tinggi menunjukkan lemahnya sistem layanan kesehatan maternal, yang tidak hanya membahayakan ibu tetapi juga berdampak pada kualitas dan kelangsungan hidup anak. Kedua indikator ini, apabila tidak diturunkan secara signifikan, akan terus menekan nilai AHH karena meningkatkan rata-rata angka kematian pada populasi usia muda.

Gizi buruk, salah satunya *stunting*, menjadi masalah kesehatan masyarakat yang dominan di Indonesia. Satu dari lima balita mengalami *stunting*, dan satu dari 12 anak mengalami *wasting* di Indonesia (UNICEF, 2023). Menurut WHO (2018) *stunting* diukur dari Z-skor terkait usia yang merupakan lebih dari dua (2) standar deviasi di bawah median Standar Pertumbuhan Anak *World Health Organization* (WHO), yang menunjukkan batas potensi pertumbuhan anak. Anak-anak dapat mengalami *stunting* berawal dari 1000 hari pertama pembuahan. Penyebabnya dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk status sosial ekonomi, asupan makanan, infeksi maupun penyakit menular, status gizi ibu, kekurangan zat gizi, dan lingkungan (WHO, 2018). Jadi, *Stunting* adalah kondisi ketika tinggi badan anak berada di bawah tinggi badan usia normal akibat dari kekurangan gizi kronis, stimulasi psikososial yang tidak mencukupi, dan infeksi berulang terutama dari masa kehamilan hingga usia dua tahun.

Berdasarkan data dari Kemenkes tahun 2023, Indonesia berhasil menurunkan prevalensi *stunting* dari 24,4% menjadi 21,6%. Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-108 dari 195 negara, ini masih mencerminkan beban yang cukup besar dibandingkan negara-negara lain. Meskipun demikian, prevalensi ini masih jauh dari target pemerintah, yaitu menurunkan angka *stunting* hingga 14% pada tahun 2024 (UNICEF et al., 2023). *Stunting* memiliki dampak multidimensi yang tidak hanya pada kesehatan fisik anak, *stunting* dapat mengurangi potensi kognitif individu, sehingga berdampak pada kemampuan mereka untuk bekerja dengan efisien. Dengan tingginya jumlah anak yang mengalami *stunting*, negara menghadapi risiko kehilangan potensi besar dari generasi mendatang.

Akibat *stunting*, negara mengalami kerugian ekonomi mencapai 11% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menurunkan pendapatan pekerja hingga 20% (Suryana & Azis, 2023). Angka ini mencerminkan potensi besar yang hilang akibat rendahnya produktivitas individu, biaya perawatan kesehatan yang meningkat, dan menurunnya kompetisi tenaga kerja di pasar internasional. Jika tidak ditangani secara serius, *stunting* dapat menjadi beban yang terus meningkat seiring dengan kebutuhan populasi yang semakin banyak.

Angka kematian ibu merupakan salah satu indikator prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penurunan angka kematian ibu menjadi fokus utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Berbagai strategi dan kebijakan telah dirancang untuk meningkatkan akses serta kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, guna mencapai target penurunan angka kematian ibu sesuai dengan agenda pembangunan nasional. Namun, di tengah upaya tersebut, pada tahun 2021 terjadi lonjakan angka kematian ibu sebesar 56,69% dibandingkan tahun 2020. Kenaikan ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam sistem kesehatan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pandemi COVID-19, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, serta meningkatnya risiko komplikasi kehamilan dan persalinan.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas layanan kesehatan ibu adalah besarnya pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan. Meskipun anggaran kesehatan nasional mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, efisiensi alokasi dana terhadap layanan kesehatan ibu masih menjadi perhatian. Pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk infrastruktur kesehatan, ketersediaan tenaga medis, serta program kesehatan ibu dan anak harus dioptimalkan agar mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kematian ibu. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan anggaran yang tepat sasaran serta perencanaan yang lebih strategis diperlukan untuk memastikan bahwa investasi di bidang kesehatan benar-benar dapat meningkatkan kualitas layanan, terutama bagi ibu hamil dan melahirkan.

Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator kesehatan yang menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025. Indikator ini mencerminkan kualitas sistem kesehatan suatu negara, terutama dalam aspek pelayanan kesehatan ibu dan anak. Penurunan angka kematian bayi menjadi fokus utama dalam pembangunan kesehatan nasional, mengingat dampaknya terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.

Berdasarkan sistem pencatatan *Maternal Perinatal Death Notification* (MPDN) dari Kementerian Kesehatan, jumlah kematian bayi tercatat sebanyak 20.882 kasus pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 29.945 kasus pada tahun 2023 (Rokom, 2024). Peningkatan ini menandai kenaikan sekitar 43,4% dalam jumlah kematian bayi dalam periode satu tahun. Data ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam upaya menurunkan angka kematian bayi di Indonesia, meskipun berbagai program dan kebijakan telah diimplementasikan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Perlu dicatat bahwa meskipun Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup menunjukkan tren penurunan dari 26 pada tahun 2010 menjadi 16,85 pada tahun 2020 (BPS, 2020). Peningkatan absolut dalam jumlah kematian bayi antara tahun 2022 dan 2023 tetap menjadi perhatian utama. Diperlukan evaluasi dan penguatan lebih lanjut terhadap efektivitas program kesehatan yang ada, serta efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan untuk memastikan penurunan angka kematian bayi yang berkelanjutan.

Dalam upaya menurunkan AKI, AKB, dan *Stunting*, efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan memainkan peran yang sangat penting. Meskipun anggaran kesehatan terus mengalami peningkatan, optimalisasi alokasi dana untuk program-program yang berdampak langsung terhadap kesehatan ibu dan bayi masih menjadi tantangan. Pengeluaran untuk infrastruktur kesehatan, ketersediaan tenaga medis, layanan persalinan yang aman, serta program imunisasi dan gizi bayi harus dikelola dengan efisien agar menghasilkan manfaat maksimal. Kurangnya efisiensi dalam alokasi anggaran dapat menghambat peningkatan kualitas layanan kesehatan dan berdampak

pada pencapaian target penurunan angka kematian bayi. Oleh karena itu, diperlukan strategi perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran serta sistem monitoring dan evaluasi yang ketat guna memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan dapat memberikan dampak yang optimal dalam meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan bayi di Indonesia.

Tercatat bahwa pengeluaran pemerintah untuk kesehatan pada tahun 2023 sebesar 47,8% dari total belanja pemerintah. Meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 8,20% dari total belanja pemerintah tahun 2022 (Kemenkes, 2022). Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Namun, meskipun ada peningkatan yang signifikan dalam pengeluaran bidang kesehatan, jika dibandingkan dengan peningkatan kualitas kesehatan yang dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan tingkat gizi buruk (*stunting*), kecepatan peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan pengeluaran pemerintah. Tidak bisa dipastikan bahwa peningkatan pada kualitas kesehatan yang terjadi telah efisien dengan peningkatan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan. Untuk itu pentingnya pengukuran efisiensi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan karena akan membantu pemerintah memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal untuk kesehatan masyarakat.

Meskipun Indonesia sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar, faktor efisiensi penggunaan dana tetap menjadi kunci utama. Pengukuran efisiensi dapat menunjukkan apakah pengeluaran tersebut sudah tepat sasaran sehingga kualitas kesehatan seperti tingkat gizi buruk (*stunting*), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB) dapat ditangani dengan baik. Tanpa pengukuran yang jelas, anggaran besar yang dialokasikan untuk sektor kesehatan mungkin tidak akan menghasilkan perubahan signifikan, sebagaimana yang terjadi di beberapa negara dengan pengeluaran serupa namun berhasil mencapai hasil yang lebih baik.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas:

1. Berapakah tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah untuk bidang kesehatan di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2020-2022?
2. Apakah terdapat korelasi antara efisiensi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan per provinsi terhadap Angka Harapan Hidup (AHH)?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian adalah:

1. Menghitung tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan di 38 provinsi Indonesia pada tahun 2020-2022.
2. Menganalisis korelasi antara efisiensi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bidang kesehatan.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan mengenai konsep efisiensi, pengeluaran pemerintah, Angka Harapan Hidup (AHH), serta korelasi antara efisiensi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap Angka Harapan Hidup (AHH).

### 2. Manfaat Praktis

a) Bagi penulis penelitian ini bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu yang diajarkan semasa kuliah dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan serta menambah pengetahuan kepada peneliti mengenai efisiensi pengeluaran pemerintah dan korelasinya terhadap Angka Harapan Hidup (AHH).

b) Penelitian ini dapat berkontribusi sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dalam alokasi anggaran kesehatan daerah provinsi serta sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia dimensi kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH).

- c) Dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian di bidang kajian yang sama, serta dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu keuangan publik.

